

- **BAB I**
- **PENDAHULUAN**

- **Latar Belakang Masalah**

- Struktur ekonomi perdagangan lokal pada berbagai kota di Sulawesi Tenggara, pada awalnya hanya didominasi oleh para pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar. Kota Bau-Bau misalnya, yang berkembang sebagai kota dagang, mulai dari perdagangan hasil bumi, hasil laut, dan hasil hutan, hingga berbagai kebutuhan sekunder masyarakat, seperti: konveksi, elektronik, bahan bangunan, meubel, dan juga perhiasan emas, diperdagangkan kedua etnik migran tersebut. Penguasaan terhadap struktur ekonomi perdagangan lokal ini, tentu saja dapat dipahami, karena mereka telah mengalami proses pemapanan dalam konteks perdagangan antar-pulau (lokal, regional, dan nasional) yang sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan.
- Dengan kecenderungan sosio-ekonomik yang demikian itu, maka bagi kebanyakan etnik lokalnya menciptakan kondisi yang dilematis untuk ikut masuk dalam struktur ekonomi perdagangan. Ketika mereka terobsesi melakukan migrasi desa-kota untuk ikut mengembangkan perdagangan, perlu memiliki pengetahuan yang mendasar tentang perdagangan, etos kewirausahaan (rasional, strategis, dan kompetitif), serta modal material atau finansial. Sehingga, bisa berkompetisi atau menjalin kerja sama dengan para pedagang lain, terutama pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar.
- Namun, dalam fenomena empiriknya, tidak semua etnik lokal yang ada memiliki prasyarat tersebut. Karena kalkulasi rasionalitas ekonomi mereka dalam mengembangkan aktivitas perdagangan, justru masih dibentuk oleh nilai-nilai sosio-kultural ekonomi *subsisten* di pedesaan.¹ Dengan menempatkan konsep

¹Menurut Evers dan Korff, ekonomi subsisten adalah suatu kegiatan produk ekonomi yang tidak berorientasi pasar yang mendorong keberlangsungan hidup manusia, sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan lingkungan sosial terdekatnya. Lihat Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, h. 237.

moralitas sebagai suatu hal yang ideal pada konteks hubungan interaksi sosial, ketimbang perhitungan untung-rugi. Sementara itu, tuntutan terhadap “kalkulasi rasionalitas ekonomi” yang mengedepankan *profit oriented* merupakan prasyarat utama yang perlu dipraktekkan dalam sistem ekonomi modern untuk mengikuti “mekanisme pasar”. Karenanya, mereka cukup mengalami kesulitan tersendiri ketika masuk dan ikut berkiprah di arena ekonomi *pasar* yang mengedepankan prinsip untung-rugi dalam tindakan ekonomi. Dengan demikian—sebagai *kaum urban*—jika mereka ikut-serta dalam aktivitas pengembangan usaha ekonomi perdagangan di *pasar*, mereka hanya berada di lingkaran luar struktur ekonomi perkotaan.² Karena segmen usaha dagang yang mereka geluti cenderung terpinggirkan, atau sebagai pedagang kaki lima (PKL). Munculnya kecenderungan yang demikian ini, menurut Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff (2002), sebagai akibat dari proses *urbanisasi* yang berlangsung di negara-negara berkembang: “bukan terjadi karena industrialisasi, sedangkan laju *urbanisasi* justru melebihi kapasitas struktur sosial dan ekonomi kota”.

- Sementara itu, secara ekonomi politik proses perkembangan struktur ekonomi perkotaan di berbagai daerah di Indonesia, merupakan manifestasi dari kuatnya “penetrasi kapitalisme”. Fenomena ini telah berlangsung sejak masa kolonial hingga dalam pembangunan dan industrialisasi di masa Orde Baru. Dengan demikian, yang dominan sebagai pelaku ekonomi *pasar* di perkotaan, adalah para pemilik modal usaha yang lebih kuat, baik dalam jumlah kecil, menengah, maupun besar. Kecuali itu, perlu didukung dengan penguatan jaringan usaha perdagangan yang sudah dibangun sebelumnya, sebagaimana yang menonjol pada pelaku ekonomi dari migran Tionghoa dan Bugis-Makassar.
- Di wilayah Buton kepulauan, misalnya, etnik lokal yang sejak masa silam memiliki tradisi pelayaran dan perdagangan antar-pulau adalah orang Buton pesisir dan Wakatobi. Karena itu, maka sebagaimana para pedagang Tionghoa

²Sebagai contoh kasus, di Unit Pasar Sentral Wua-Wua kota Kendari. Dari sejumlah 530 orang pedagang yang mengembangkan usaha perdagangan barang dan jasa, justru cenderung didominasi oleh *kaum migran* Bugis-Makassar dan Gu-Lakudo serta *etnik* lain, ketimbang orang Tolaki. Sementara itu, komunitas *urban* orang Tolaki, yang pada prinsipnya kota Kendari merupakan “pengembangan basis ekonomi kedaerahan mereka”, hanya terlibat dalam aktivitas usaha dagang kecil-kecilan di sekitar pasar. Achmad Salu (Kepala Unit Pasar Sentral Wua-Wua), *Data Pedagang yang Menggunakan Kios/Los dalam Perdagangan*, Kendari 27 Oktober 2007.

dan Bugis-Makassar, mereka juga ikut berkiprah dalam perdagangan di kota Bau-Bau. Namun dalam perkembangan usaha dagang mereka, justru mengalami “stagnasi” bahkan cenderung kemunduran. Penyebab utamanya adalah keterputusan generasi mereka dalam upaya mengembangkan perdagangan, akibat terjadinya pergeseran orientasi kehidupan mereka setelah berlangsungnya pembangunan.

- Dengan setting *sosio-ekonomik* yang demikian itu, pada akhir tahun 1960-an, orang Gu-Lakudo mulai melakukan migrasi desa-kota, terutama ke kota Bau-Bau. Sebagai pendatang baru (*kaum migran*), tentu saja tidak secara langsung mereka mendapatkan akses yang terbuka untuk mengembangkan perdagangan di wilayah perkotaan. Tantangan awal yang mereka hadapi, secara internal mereka tidak didukung dengan modal material atau finansial. Sedangkan secara eksternal, mereka harus mampu berkompetisi atau sebaliknya membangun hubungan kerja sama dengan pedagang dari etnik lain. Namun demikian, dengan ketaatan menjalankan ajaran agama Islam, yang disertai kerja keras, hidup hemat, menjaga kepercayaan, dan juga bersikap sabar, mereka menjalani pola hidup yang berorientasi kewirausahaan. Mereka terus berjuang agar bisa mendapat peluang untuk mengembangkan usaha perdagangan.
- Pada tahap awal mereka berada di kota Bau-Bau—atau pun kota-kota lain, seperti Ambon—ada beberapa tipe aktivitas ekonomi yang dilakukan orang Gu-Lakudo terkait dengan upaya pengembangan usaha dagang. *Pertama*, mereka yang memiliki sedikit modal material, mulai mengembangkan perdagangan. Ada yang berdagang hasil laut ke Makassar dan Surabaya, sebelum berdagang pakaian jadi. Namun, ada juga yang langsung berdagang pakaian jadi di kota Bau-Bau. *Kedua*, mereka yang tidak memiliki modal awal untuk mulai berdagang. Sebagai pilihannya, adalah menjalin “hubungan kepercayaan” dengan pedagang Tionghoa. Mereka mengambil barang dagangan dari yang memberi kepercayaan terhadap mereka, kemudian dijual di berbagai pasar tradisional di kampung-kampung/desa, hingga sampai di wilayah kabupaten Muna. Lalu hasilnya, mereka mendapatkan “komisi”. Model perdagangan yang demikian ini, yang mereka sebut berdagang

“barang komisi”. *Ketiga*, mereka yang hanya melakukan kerja serabutan, dengan tujuan bisa mendapatkan modal awal untuk berdagang kecil-kecilan.

- Oleh karena itu, apa yang bisa dikonsepsikan dari fenomena kehidupan sosial ekonomi orang Gu-Lakudo pada tahap awal mereka meninggalkan daerah salanya ke kota Bau-Bau dan mulai mengembangkan usaha perdagangan, adalah sebagai bentuk perjuangan awal ketika memulai membangun kekuatan basis sosial ekonomi mereka. Setelah pemerintah kabupaten Buton membangun pasar sentral Bau-Bau (1970-an), maka mulai membuka akses bagi para pedagang Gu-Lakudo untuk berdagang pakaian jadi dan barang-barang kelontong. Hal ini kemudian didukung dengan datangnya kapal-kapal perintis Pelni, seperti kapal Berantas dan Berau dari kawasan Barat ke kawasan Timur Indonesia. Sehingga, memungkinkan bagi para pedagang di kota Bau-Bau—termasuk orang Gu-Lakudo—berangkat sendiri ke Makassar, Surabaya dan Jakarta untuk berbelanja barang kebutuhan perdagangan. Kondisi ini semakin merangsang perkembangan kota Bau-Bau yang memang sejak masa kolonial telah dikenal sebagai “kota dagang” di Sulawesi Tenggara.
 - Dengan terciptanya kondisi tersebut, maka secara sosio-ekonomik mendukung proses “konsolidasi awal” dalam perkembangan usaha dagang orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau (1970-an—1980-an). Akibat positifnya, maka mulai mendorong mobilitas perdagangan mereka pada konteks lokal. Proses selanjutnya, menarik minat generasi berikutnya orang Gu-Lakudo untuk melakukan migrasi desa-kota, kemudian ikut mengembangkan usaha dagang, baik di kota Bau-Bau maupun kota lain, seperti Ambon.
- Tahap berikutnya (1980-an—1990-an), dalam perkembangan ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo, adalah “penguatan basis usaha dagang”. Mereka tidak hanya menjalin hubungan kepercayaan dengan pedagang Tionghoa, tetapi juga dengan lembaga finansial, seperti BRI dan BNI. Menurut kedua lembaga keuangan tersebut, pemberian bantuan pinjaman modal usaha dagang terhadap para pedagang Gu-Lakudo, karena mereka sangat konsisten dalam pengembalian kredit. Sehingga, permintaan kredit selalu dilayani oleh kedua institusi finansial

tersebut. Karena itu, setelah memasuki tahun 1990-an, mobilitas perdagangan mereka semakin menonjol, hingga melakukan difersifikasi usaha dagang dan juga perluasan pasar perdagangan ke kota Raha dan Kendari.

- Dalam perkembangan selanjutnya (1990-an—2000-an), adalah semakin memapankan basis-basis usaha perdagangan yang mereka bangun, khususnya di kota Bau-Bau. Sebagai salah satu etnik lokal (Muna—Buton), secara fenomenal mereka dapat dikategorikan berhasil melakukan transformasi sosial ekonomi dari konteks ekonomi subsisten (tradisional) di pedesaan pada pengembangan ekonomi pasar (modern) di perkotaan di Sulawesi Tenggara.³
- Berdasarkan data lapangan yang ditemukan dalam penelitian, di kota Bau-Bau misalnya, ada tiga pasar utama yang menjadi pusat perdagangan barang-barang konveksi dan barang lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya yang dominan dalam melakukan perdagangan pada ketiga pasar tersebut, adalah justru berasal dari para pedagang Gu-Lakudo. Mereka berdagang pakaian jadi, tas pakaian, sandal-sepatu, barang imitasi, kosmetik, elektronik, kaset/CD/DVD, dan barang pecah-belah. Namun demikian, banyak juga yang berdagang di luar bangunan pasar sebagai pedagang kecil.
- Pada pasar La Elangi, misalnya, sejumlah 153 orang pedagang yang melakukan perdagangan, lebih dari setengahnya adalah berasal dari *kaum urban* orang Gu-Lakudo. Kalau dirinci dengan menggunakan kategori etnisitas, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 87 orang berasal dari pedagang Gu-Lakudo, 31 orang pedagang Wadiabero, 19 orang pedagang Buton, 12 orang pedagang

³Keberhasilan ekonomi perdagangan kaum urban dan migran orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara, juga mendapat pengakuan dari dua pejabat Gubernur daerah tersebut, yaitu La Ode Kaimuddin dan Ali Mazi. Dalam acara sosialisasi pengembangan usaha dengan menggunakan pola pendekatan syariat Islam (2000), Kaimuddin menyatakan: “kita patut mencontoh dan mempelajari pola bisnis yang dilakukan masyarakat Gu-Lakudo yang secara kasat mata mereka taat beribadah dan pekerja keras sehingga saat ini mereka sudah berhasil mengungguli para pengusaha dari komunitas lain di daerah ini. Terutama yang nampak dewasa ini adalah mereka telah menguasai sektor perdagangan barang-barang konveksi di sebagian besar pasar di tiga kota, seperti: Bau-Bau, Raha, dan Kendari”. Sementara itu, dalam sambutannya pada Lomba Desa (2003), Ali Mazi mengatakan, bahwa: “keberhasilan masyarakat Gu-Lakudo dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari ketaatan mereka menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, sebagaimana yang dapat terlihat di pasar- pasar, mereka selalu melakukan shalat tepat waktu kalau sudah adzan”. Kaharuddin Syukur dalam Disertasi Samdin, *Pemahaman Modal dalam Praktek Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara*, Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Wakatobi, 10 orang pedagang Baruta, 2 orang pedagang Minang, dan 2 orang pedagang Bugis-Makassar.⁴

Demikian juga di Mall Umna Rijoli Bau-Bau, dari sejumlah 128 orang pedagang, orang Gu-Lakudo yang mendominasi usaha perdagangan di pasar modern tersebut. Secara etnisitas, adalah dapat digambarkan sebagai berikut: 58 orang pedagang Gu-Lakudo, 13 orang dari pedagang Buton, 12 orang pedagang Wadiabero, 11 orang pedagang Lamena, 6 orang pedagang Kabaena, 5 orang pedagang dari Kadatua, 4 orang pedagang Wakatobi, 4 orang pedagang Bugis-Makassar, 3 orang pedagang dari Baruta, dan 1 orang pedagang Siompu, serta 1 orang pedagang Tionghoa.⁵

Sementara itu, di pasar Karya Nugraha, para pedagang Gu-Lakudo menempati urutan kedua setelah orang Wadiabero. Rinciannya secara etnisitas, adalah sebagai berikut: 41 orang pedagang Wadiabero, 37 orang dari pedagang Gu-Lakudo, 15 orang pedagang Baruta, 12 orang pedagang Lamena, dan 8 orang pedagang Buton.⁶

Apa yang dapat dikonsepsikan dari data lapangan tentang keberadaan pelaku ekonomi perdagangan di tiga pasar⁷ tersebut, adalah bahwa para pedagang Gu-Lakudo cenderung mendominasi aktivitas usaha perdagangan. Artinya, berbagai *kaum urban* yang berasal dari *etnik* lokal, orang Gu-Lakudo memiliki keunggulan kompetitif dalam hal mengembangkan ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau. Karena itu, selain para pedagang yang digambarkan pada ketiga pasar tersebut, mereka juga banyak yang mengembangkan aktivitas usaha dagang di luar pasar. Terkait dengan keberadaan *kaum migran* orang Gu-Lakudo sebagai pelaku ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau, setidaknya dapat dikategorikan menjadi empat kelompok: (1) pedagang yang berjualan di pasar; (2) pedagang yang membangun toko; (3) pedagang di pasar dan toko; (4) pedagang kecil-kecilan di luar pasar.

⁴Diolah dari data lapangan, 2007/2008.

⁵Diolah dari data lapangan, 2007/2008.

⁶Diolah dari data lapangan, 2007/2008.

⁷Pasar La Elangi, Nugraha, dan Mal Umna Rijoli, adalah dibangun oleh kalangan swasta, bukan pemerintah kota Bau-Bau. Karena itu, bagi para pedagang yang berobsesi untuk mengembangkan usaha perdagangan di tiga pasar tersebut, mereka harus mampu membeli tempat perdagangan dengan harga yang cukup mahal. Konsekwensinya adalah bahwa untuk bisa berdagang di salah satu pasar utama kota Bau-Bau itu, adalah membutuhkan kesiapan modal perdagangan yang juga lumayan besar bagi ukuran para pedagang kecil dan menengah. *Pertama*, perlu menyipkan dana awal untuk membeli tempat berdagang, mulai dari Rp. 60 juta hingga Rp. 90 juta. *Kedua*, belanja barang perdagangan ke Surabaya atau Jakarta, yang juga membutuhkan modal minimal berkisar Rp 50 juta sampai Rp. 100 jutaan. Wawancara dengan salah seorang informan dari pedagang Gu-Lakudo di Bau-Bau, 2007.

Pada kategori pertama, pedagang yang memang secara khusus mereka mengembangkan usaha perdagangan di tiga pasar kota Bau-Bau (La Elangi, Karya Nugraha, dan Mall Umna Rijoli). Secara umum mereka yang berdagang di salah satu pasar tersebut, adalah mereka yang memiliki modal usaha dagang yang sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan permodalan dalam perdagangan. Dari para pedagang Gu-Lakudo yang mengembangkan usaha dagangnya di pasar, adalah memperdagangkan barang-barang konveksi, seperti pakaian jadi, sandal-sepatu, tas pakaian, dan jenis barang lainnya.

Sedangkan kategori kedua, pedagang yang mengembangkan usaha perdagangannya pada bangunan pertokoan, sebagaimana halnya para pedagang Tionghoa. Bagi para pedagang Gu-Lakudo yang berdagang di toko-toko mereka, tentu saja memiliki kemampuan permodalan yang sudah cukup kuat dibanding mereka yang berdagang di pasar. Karena selain harus membeli tanah-tanah permukiman di pusat kota Bau-Bau dengan harga yang tinggi, juga kebutuhan permodalan untuk pengadaan barang-barang dagangan. Adapun segmen usaha dagang mereka adalah bervariasi, seperti: konveksi, alat-alat olah raga, meubel, barang-barang campuran, dan bahan bangunan.⁸

Adapun kategori ketiga, para pedagang yang memiliki dua tempat sekaligus (toko dan pasar) dalam mengembangkan usaha perdagangan. Pedagang Gu-Lakudo yang memiliki dua tempat untuk berdagang, adalah mereka yang sudah didukung dengan kemampuan modal usaha dagang yang kuat. Mereka pun berdagang barang-barang dagangan yang dominan diperdagangkan oleh pedagang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau. Karenanya, ada yang memang hanya fokus pada perdagangan barang konveksi, baik di pasar maupun di toko-toko yang mereka miliki. Namun, ada juga yang mengembangkan usaha perdagangan yang berbeda dengan di pasar dan di toko mereka. Dalam hal ini, selain mereka membangun pertokoan, seperti untuk penjualan barang-barang campuran, meubel, dan barang lain, juga memiliki tempat berdagang barang konveksi di pasar.⁹

Sementara itu kategori keempat, para pedagang yang tidak memiliki toko atau tempat pada tiga pasar utama di kota Bau-Bau (La Elangi, Nugraha, dan Mal Umna). Mereka ini yang

⁸Dari hasil observasi lapangan ketika berlangsungnya penelitian, ada beberapa segmen usaha dagang yang masih didominasi oleh para pedagang China, misalnya: bahan bangunan, elektronik, perdagangan hasil bumi dan laut, serta kendaraan bermotor, seperti sepeda motor.

⁹H. Radeni, misalnya, selain memiliki toko *Indomaret* yang dikelola oleh anak dan keponakannya sebagai tempat penjualan barang-barang campuran, *foto copy*, dan *rental komputer*, namun juga memiliki tempat berdagang barang-barang konveksi di Mall Umna Rijoli. Radeni, Wawancara di Bau-Bau 17 Februari 2008.

mengembangkan usaha dagangnya di luar ketiga pasar tersebut. Karenanya, secara sosiologis mereka berada pada lapis bawah stratifikasi ekonomi *kaum migran* orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau. Karena kemampuan permodalan mereka masih terbatas untuk mengembangkan usaha dagangnya sebagaimana para pedagang yang lainnya. Oleh karena itu, mereka dapat dikategorikan sebagai para pedagang kecil di perkotaan. Adapun barang-barang dagangan yang mereka perdagangkan, pada umumnya yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti: beras eceran, gula lokal, bawang merah, makanan kemasan, rokok, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Lalu bagaimana dengan keberadaan para pedagang Gu-lakudo di kota Raha dan Kendari? Pada kedua kota tersebut, tentu saja berbeda dengan di kota Bau-Bau. Kalau di kota tujuan awal mereka ketika melakukan migrasi desa-kota itu, mereka dapat dikategorikan menjadi empat kelompok pedagang. Namun, kecenderungan tersebut berbeda dengan keberadaan mereka di kota Raha dan Kendari.

Di pasar semi-tradisional Laino di kota Raha, misalnya, secara umum hanya terfokus pada perdagangan barang konveksi. Mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo di ibu kota kabupaten Muna ini, dapat dikategorikan cenderung bersifat stagnan. Terciptanya kondisi yang demikian, karena “iklim perdagangan” di kota tersebut, tidak terlalu mendukung bagi berkembangnya perdagangan barang dan jasa.¹⁰ Dari sejumlah 313 orang pedagang barang konveksi di pasar Laino Raha, pedagang Gu-Lakudo hanya berjumlah 69 orang.

Kondisi perdagangan mereka di kota Raha, justru berbeda dengan di kota Kendari. Perkembangan usaha dagang mereka di ibu kota Provinsi Sulawesi tenggara tersebut, cukup dinamis. Keberadaan para pedagang Gu-Lakudo, juga terfokus pada penjualan barang-barang konveksi di pasar sentral Wua-Wua dan Mall Mandonga Kendari. Meskipun keberadaan mereka

¹⁰Ketika peneliti melakukan penelitian lapangan di pasar Laino Raha pada bulan Maret dan April 2008, dari hasil perbincangan dengan salah seorang pedagang Gu-Lakudo, ia menyatakan bahwa perkembangan usaha dagang mereka di kota ini cenderung lamban. Menurutnya, gejala ini adalah disebabkan masih rendahnya “daya beli” masyarakat. Dia mencontohkan, misalnya ketika memasuki persiapan hari raya *idul fitri*, kondisi perdagangan di pasar Laino, kota Raha, tidak jauh berbeda dengan keadaan pada bulan/hari-hari biasanya. Sementara itu, di kota lain—seperti Bau-Bau—sejak pertengahan bulan puasa sudah menunjukkan aktivitas perdagangan intensitasnya cukup tinggi. Karena para pembeli, baik masyarakat kota maupun yang berasal dari desa/kecamatan, datang membanjiri pasar untuk berbelanja barang kebutuhan mereka, seperti pakaian jadi dan berbagai kebutuhan lainnya. Dengan kondisi perdagangan yang cenderung “stagnan” di pasar Laino tersebut, maka membuat para pedagang Gu-Lakudo—secara perorangan—mulai meninggalkan kota Raha untuk memindahkan usaha dagang mereka, baik ke Bau-Bau atau pun ke Kendari. Data kualitatif yang diolah kembali oleh peneliti melalui hasil observasi dan perbincangan dengan salah seorang pedagang Gu-Lakudo di pasar Laino, Raha, Maret 2008.

tidak dominan di kedua pasar tersebut, tetapi usaha dagang yang mereka geluti cukup berkembang, jika dibandingkan dengan yang ada di kota Raha.

Di pasar sentral Baru Wua-Wua, misalnya, dari sejumlah 514 orang pedagang yang berdagang di los-los pasar tersebut, pedagang Gu-Lakudo sebanyak 121 orang. Mereka pada umumnya berdagang pakaian jadi, sandal-sepatu, dan lain-lain. Sementara itu di Mall Mandonga, yang para pedagangnya berjumlah 517 orang dari berbagai etnik yang ada di Sulawesi Tenggara, pedagang Gu-Lakudo sebanyak 138 orang. Jumlah mereka berada pada urutan kedua setelah pedagang Bugis-Makassar, yang berdagang di pasar modern kota Kendari tersebut.

Oleh karenanya, menangkap fenomena perkembangan sosial ekonomi orang Gu-Lakudo, secara sosiologis dapat dikonsepsikan bahwa mereka berhasil melakukan mobilitas sosial dan ekonomi, baik *horizontal* geografis maupun *vertikal*. Ketika mereka terobsesi meninggalkan daerah asalnya, kemudian masuk dalam struktur sosial masyarakat kota sebagai *kaum migran*, sama artinya dengan melakukan mobilitas geografis. Dan ketika orang Gu-Lakudo berhasil masuk dalam struktur ekonomi kota yang bersifat kompetitif, berarti mereka juga telah melakukan mobilitas *vertikal*. Karena itu, mengantarkan mereka pada konteks stratifikasi sosial ekonomi perkotaan sebagai “kelas menengah baru” di Sulawesi Tenggara.¹¹

Namun, di balik keberhasilan mereka dilatar-belakangi oleh proses perubahan orientasi kehidupan dari konteks yang cenderung bersifat primitif-tribal pada nilai-nilai modernis-rasional. Karena itu, asumsi dasar yang dibangun dalam penelitian tentang fenomena sosial ekonomi orang Gu-Lakudo ini, adalah bahwa motif keberhasilan mereka tidak muncul dengan tiba-tiba setelah mengembangkan usaha perdagangan di kota Bau-Bau. Tetapi, berawal dari proses perubahan orientasi paham keagamaan mereka sejak di daerah asalnya, sebelum melakukan urbanisasi dan migrasi desa-kota. Perubahan dari sinkretisme keyakinan mistikal Islam dengan tradisi leluhur mereka pada konteks modernis-rasional Islam.

¹¹Secara *socio-historis* dan *kultural*, keberadaan orang Gu-Lakudo di masa lalu berada pada struktur sosial “bawah” menurut sistem nilai budaya Buton. Namun, dengan keberhasilan mereka mengembangkan usaha ekonomi perdagangan selama tiga dekade lebih ini (1970-an—2008), mereka dapat dikategorikan sebagai “kelas menengah baru” dalam struktur kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama masyarakat perkotaan. Di kota Bau-Bau, misalnya, kalau sebelumnya struktur perekonomian kota didominasi oleh para pedagang China dan Bugis-Makassar; maka setelah memasuki dekade 1990-an—2000-an, justru mulai terjadi pergeseran. Dalam pengertian, secara kompetitif pedagang Gu-Lakudo menggeser *peran-dominatif* orang Bugis-Makassar dalam perdagangan barang dan jasa. Karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, yang menjadi pesaing utama terhadap pedagang China, adalah *kaum urban* orang Gu-Lakudo. Menurut analisis peneliti, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh pedagang China di kota itu, sehingga posisi mereka tetap dominan. *Pertama*, secara *ekonomi politik*, orang China telah lama mendominasi struktur ekonomi perdagangan.

Perubahan tersebut berlangsung setelah datangnya H. Abdul Syukur di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna. Setelah belajar ilmu agama selama lima tahun di Mekkah, Syukur membawa gagasan pembaruan Islam yang disinergiskan dengan aktivitas perdagangan antar-pulau. Pembaruan keagamaan yang dilakukan Abdul Syukur, adalah bersifat *egaliter*, *modern*, dan *transformatif*, serta berorientasi pada terintegrasinya nilai-nilai ajaran keagamaan dalam Islam dengan aktivitas ekonomi perdagangan.

Gagasan pembaruan Islam yang dicanangkan Abdul Syukur pada masyarakat Gu-Lakudo ketika itu, mensinergiskan kekuatan *spiritualitas Islam* dengan semangat “kewirausahaan” (*entrepreneurs*). Karena Abdul Syukur sendiri sebagai salah seorang ulama yang menyebarkan syiar Islam melalui aktivitas perdagangan antar-pulau. Dalam konteks ini, Abdul Syukur berperan sebagai ulama pedagang, modernis, dan transformatif terhadap orang Gu-Lakudo. Hal ini berlangsung sekitar tiga puluh tahunan. *Pertama*, ketika di daerah asal mereka sekitar dua puluh tahun lebih (1942—1964). *Kedua*, setelah mereka melakukan urbanisasi ke Bau-Bau, mengikuti ajakan Abdul Syukur (1968—1976).

Oleh karena itu, maka Abdul Syukur berhasil merombak orientasi paham keagamaan orang Gu-Lakudo dari kehidupan *primitif-tribal* pada konteks *kemodernan*. Artinya, nilai-nilai Islam yang diajarkan Abdul Syukur, mewarnai kehidupan keseharian mereka dengan membentuk “fenomena sosial baru” yang menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka untuk mengembangkan usaha perdagangan di wilayah perkotaan, khususnya kota Bau-Bau.

Dengan terlebih dulu melewati proses pembaruan terhadap orientasi paham keagamaan tersebut, maka ketika orang Gu-Lakudo melakukan urbanisasi ke kota Bau-Bau, sudah menampilkan “etos ekonomi” yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan rasionalitas tindakan ekonomi dalam perdagangan. Sebagai *kaum migran* desa-kota, mereka mulai menunjukkan aktivitas kehidupan yang cukup kompetitif terhadap etnik lokal lain di kota Bau-Bau.

Namun demikian, sudah merupakan suatu fenomena umum dalam realitas kehidupan orang Gu-Lakudo, jika mengedepankan “model keseimbangan hidup” antara pemenuhan kepentingan dunia dan akhirat. Dalam pengertian, orientasi pemahaman terhadap “sistem nilai agama” yang mereka anut, justru memperkuat basis perekonomian mereka dan sekaligus mendorong mobilitas usaha dagang yang mereka kembangkan. Sebaliknya, penghasilan yang mereka peroleh dari aktivitas perdagangan, meningkatkan kualitas kehidupan

beragama mereka, seperti: membangun masjid, naik haji, mengirim anak-anak mereka ke pondok pesantren di Jawa, dan juga berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, hingga ke Timur Tengah.

Karena memang dalam Islam—baik secara *normatif-teologis* yang bersifat *doktrin individual* maupun *amal-kebajikan* secara kolektivitas—adalah menekankan perlunya mengedepankan “pola keseimbangan hidup”. Bagi setiap muslim, tidak hanya ditekankan untuk semata-mata taat beribadah kepada Tuhan demi mencapai kebahagiaan akhirat, tetapi juga harus bekerja keras dengan menggunakan kemampuan rasionalitas, kompetitif, dan strategis. Dalam kaitannya dengan membuka akses sumber daya ekonomi, Islam memberikan respon yang positif terhadap pengembangan aktivitas perdagangan, seperti yang pernah dilakukan oleh Muhammad sebelum menjadi Nabi.¹²

Bagi orang Gu-Lakudo, selain mereka dikenal sebagai muslim yang taat menjalankan ibadah formal (*ritual*) keagamaan, tetapi juga menunjukkan mobilitas ekonomi yang kompetitif. Mereka memosisikan institusi *masjid* dan *pasar* secara *relasional*. Keberadaan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi merupakan institusi sosial keagamaan yang memungkinkan bagi umat Islam untuk melakukan inter-aksi sosial dan membangun hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan. Sebaliknya, pasar tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya transaksi *jual-beli* barang dan jasa dengan mengedepankan prinsip *self-interest* dan *profit oriented*, tetapi juga sebagai institusi ekonomi yang memiliki “ruang sosial yang terbuka” terhadap proses inter-aksi antar-sesama individu dan kolektivitas masyarakat.

Karenanya, mencermati aktivitas ekonomi perdagangan sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang Gu-Lakudo, agaknya memiliki kesulitan tersendiri untuk memisahkan dengan tegas antara tuntutan moral di satu pihak dan rasionalitas ekonomi di pihak lain. Melainkan keduanya saling terkait dan bahkan cenderung terintegrasi dengan kuat, yang kemudian mendorong mobilitas usaha perdagangan mereka di kota Bau-Bau, hingga melakukan perluasan pasar ke kota Raha kabupaten Muna dan Kendari, ibu kota propinsi Sulawesi Tenggara.

¹²Muhammad sejak usia muda sudah terlibat dalam aktivitas perdagangan. Ketika mulai merintis karirnya sebagai pedagang, diawali dengan kegiatan usaha dagang kecil-kecilan. Strategi dagang yang dilakukannya dengan cara membeli barang-barang dagangan dari pasar tertentu, kemudian dijual kembali pada pasar utama di kota Makkah. Adapun etos perdagangan yang dipraktekan adalah perlunya membangun *trust* dan *networks*. Karenanya, dalam perkembangan usaha dagang yang digelutinya, dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari para pemilik modal untuk dikelola dalam usaha perdagangan. Lihat misalnya, Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Tazkia Publishing & ProLM Centre, Jakarta, 2007, h. 81.

Apa yang dapat dikonsepsikan dari fenomena kehidupan ekonomi orang Gu-Lakudo, adalah bahwa selain berorientasi pada pencapaian keuntungan yang bersifat material, tetapi juga dalam konteks kehidupan sosial keagamaan, baik secara individual maupun kolektivitas. Salah satu hal yang dapat ditangkap dari kecenderungan itu, ketika orang Gu-Lakudo terlibat dalam pengembangan usaha perdagangan, tidak hanya berorientasi pada perbaikan kehidupan ekonomi, tetapi juga untuk naik haji, membangun masjid, sarana pendidikan Islam seperti pesantren, dan amal kebajikan lainnya.

B. Permasalahan dalam Penelitian

1. Fokus Penelitian Disertasi

Studi ini menganalisis bagaimana proses transformasi sosial ekonomi orang Gu-Lakudo dari konteks ekonomi subsisten di pedesaan pada ekonomi modern di perkotaan. Prosesnya berlangsung sejak di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna hingga melakukan migrasi ke kota Bau-Bau pada akhir tahun 1960-an dan kemudian mulai mengembangkan usaha perdagangan. Karena itu, untuk mengkonstruksikan bagaimana mereka melakukan transformasi sosial ekonomi tersebut, maka perlu dianalisis dari dua konteks yang membentuk fenomena kehidupan sosial mereka: (1) ketika masih di daerah asal mereka; dan (2) setelah melakukan migrasi desa-kota.

Di daerah asal mereka adalah berkaitan dengan proses awal perubahan orientasi paham keagamaan dari konteks kepercayaan mistik Islam dan agama tradisi leluhur mereka pada kehidupan beragama yang bersifat modernis-rasional yang berlangsung sekitar dua puluh tahunan (1940-an—1960-an). Perubahan orientasi paham keagamaan orang Gu-Lakudo tersebut, kemudian membentuk etos ekonomi perdagangan mereka yang mengintegrasikan nilai-nilai modernisme Islam dengan aktivitas perdagangan. Sedangkan pada konteks berikutnya, adalah setelah mereka bermigrasi ke kota Bau-Bau pada akhir tahun 1960-an. Mereka mulai mengembangkan perdagangan, membangun basis usaha dagang barang konveksi, melakukan difersivikasi usaha dagang, dan selanjutnya melakukan perluasan pasar perdagangan keluar kota Bau-Bau. Proses seperti ini berlangsung dari tahun 1970-an—2000-an.¹³

¹³Studi tentang fenomena sosial ekonomi *kaum urban* dan *migran* pada berbagai kota di Sulawesi Tenggara, agaknya belum banyak dilakukan, baik oleh kalangan ilmuwan lokalnya maupun yang berasal dari luar daerah tersebut. Namun demikian, salah satu studi yang berkaitan dengan fenomena “pemahaman modal” dalam pengembangan usaha perdagangan orang Gu-Lakudo, adalah seperti yang telah dilakukan oleh Samdin, sebagai suatu kajian disertasi. Dalam studi ini, Samdin menggunakan pendekatan pemikiran ekonomi pembangunan. Yang fokus pada pemahaman tentang “modal” dalam aktivitas usaha perdagangan. Samdin, *Pemahaman Modal dalam*

Sebagai *kaum migran* desa-kota yang terus bergelut dengan aktivitas ekonomi perdagangan, selama rentang waktu tiga puluh tahun, mereka berhasil membangun basis-basis usaha perdagangan lokal di wilayah perkotaan di Sulawesi Tenggara. Padahal sebelumnya cenderung didominasi oleh pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar.

Dengan demikian, maka dalam konteks perdagangan orang Gu-Lakudo selain berhasil melakukan transformasi sosial ekonomi desa-kota, juga mampu mengimbangi dominasi usaha perdagangan orang Tionghoa dan Bugis-Makassar. Menonjolnya fenomena ini, adalah sebagaimana yang tampak di kota Bau-Bau. Kalau pada awalnya mereka hanya fokus pada penjualan pakaian jadi dan barang kelontong, kemudian melakukan diversifikasi usaha dagang seperti: sembako, meubel, bahan bangunan, dan bahkan ada di antara mereka yang membangun *mini market*. Selain itu, seperti halnya pedagang Tionghoa, mereka juga membangun pertokoan sebagai tempat berdagang, selain di tiga pasar utama di kota Bau-Bau (Karya Nugraha, La Elangi, dan Mall Umna Rijoli).

Karena itu, fokus studi ini mengkonstruksikan kemampuan kompetitif orang Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha ekonomi perdagangan di wilayah perkotaan di Sulawesi Tenggara. Adapun rangkaian fenomena empiriknya mulai berlangsung sejak di daerah asal mereka sebelum bermigrasi ke kota Bau-Bau. Berkaitan dengan hal ini, kondisi sosial budaya dan paham keagamaan seperti apa yang telah membentuk mereka sebelum melakukan *migrasi*, kemudian mereka ikut terlibat dalam pengembangan ekonomi perdagangan di perkotaan.

Proses kondisional tersebut, adalah terkait dengan misalnya: (1) faktor apa yang menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka; (2) dorongan mereka meninggalkan daerah asalnya; (3) mulai membuka akses usaha perdagangan di kota Bau-Bau; dan (4) mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan kehidupan beragama dalam Islam. Dari keempat hal tersebut dijadikan rujukan analisis untuk mengkonstruksikan keberhasilan orang Gu-Lakudo dalam mengembangkan usaha perdagangan di wilayah perkotaan di Sulawesi Tenggara.

Setelah orang Gu-Lakudo mulai bermigrasi pada akhir tahun 1960-an dan terobsesi mengembangkan usaha perdagangan, maka struktur perekonomian kota Bau-Bau mengalami perubahan. Kalau sebelumnya, ekonomi perdagangan kota tersebut, cenderung terkonsentrasi pada keunggulan para pedagang Tionghoa dan Bugis-Makassar. Namun kemudian, orang Gu-

Praktek Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara (Disertasi), Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Lakudo pun ikut memainkan peran-aktif dalam pengembangan usaha perdagangan, terutama berkaitan dengan penjualan pakaian jadi dan barang kelontong. Karenanya, ketika pemerintah kabupaten Buton selesai membangun pasar sentral Bau-Bau (1972)—berdekatan dengan masjid raya—aktivitas perdagangan pakaian jadi di pasar tersebut, kembali didominasi oleh pedagang Gu-Lakudo, dan hanya sedikit pedagang dari orang Buton asli, Bugis-Makassar, dan etnik lain. Sedangkan pedagang Tionghoa, lebih terkonsentrasi di pertokoan mereka. Atau, membangun basis-basis usaha perdagangan yang baru di kota Bau-Bau.

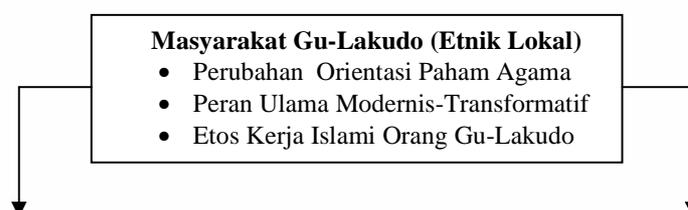
2. Rumusan Masalah

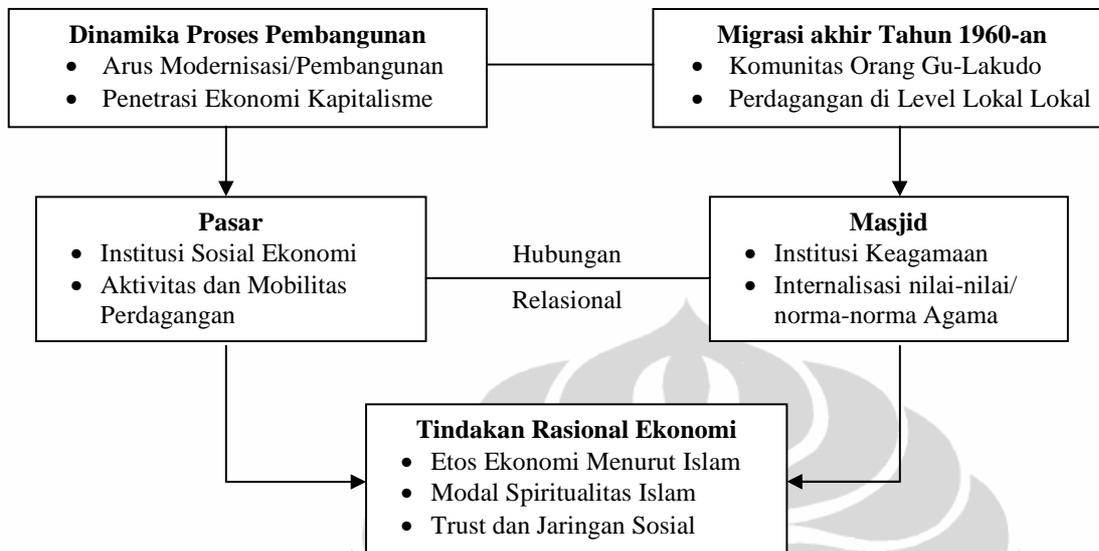
Pada masa silam, sebelum orang Gu-Lakudo menerima ajaran Islam yang bernuansa pembaruan keagamaan (modernis-rasional) orientasi kehidupan mereka dibentuk oleh paham sinkretis mistik Islam dengan kepercayaan agama tradisi leluhur mereka. Konstruksi kehidupan sosial budaya dan agama yang demikian ini, secara sosio-historis dan kultural ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, sistem kehidupan orang Gu-Lakudo di masa silam berada pada struktur sosial dan budaya “pinggiran” dalam pemerintahan kesultanan Buton. Karena daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna, menjadi salah satu wilayah penyangga (*kadie*) dari kesultanan Buton. *Kedua*, ajaran keislaman yang disebarluaskan oleh kesultanan cenderung bersifat elitis. Karena ajaran Islam yang dianut adalah dimensi mistik Islam (tasawuf), menjadi “alat legitimasi” bagi kekuasaan kesultanan Buton. Akibatnya, wilayah-wilayah pinggiran—termasuk daerah orang asal orang Gu-Lakudo—tidak mendapatkan sentuhan islamisasi yang sistematis.

Dengan kedua hal tersebut, ditambah kondisi alam mereka yang tandus menyebabkan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan agama orang Gu-Lakudo cenderung bersifat tribal di selat Buton. Terjadinya perubahan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan agama mereka setelah datangnya Abdul Syukur di daerah asal mereka dan menetap tinggal di sana dari tahun 1942—1964. Memantapkan kembali keyakinan beragama masyarakat Gu-Lakudo dan menuntun mereka untuk hidup secara Islami, dia juga mendorong mereka untuk mengembangkan usaha perdagangan.

Bagan 1.1

Alur Proses Transformasi Sosial Ekonomi Orang Gu-Lakudo





Sumber: Diolah dari hasil studi lapangan di Bau-Bau dan Lakudo (2007)

Dengan fenomena sosial yang demikian itu, kemudian dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian: “Apakah nilai-nilai pembaruan keagamaan dalam Islam yang mendorong proses transformasi dan mobilitas sosial ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo?” Pertanyaan tersebut, selanjutnya dirumuskan kembali dalam beberapa pertanyaan penelitian lapangan, sebagai berikut:

1. Adakah aktor sosial yang memainkan peran-penting dalam proses perubahan orientasi kehidupan orang Gu-Lakudo? Peran seperti apa yang dilakukan dalam mendorong pengembangan ekonomi perdagangannya.
2. Dengan penerimaan terhadap paham pembaruan Islam, elemen-elemen apa saja yang berubah dalam konteks kehidupan orang Gu-Lakudo?
3. Bagaimana masyarakat Gu-Lakudo melakukan adaptasi terhadap pengaruh pembaruan keagamaan tersebut?
4. Bagaimana pola hubungan sosial antar-sesama orang Gu-Lakudo dan antara orang Gu-Lakudo dengan etnik lain?

Oleh karena itu, dengan rumusan keempat pertanyaan tersebut di atas, dapat mengarahkan peneliti untuk mencari dan menemukan data-data lapangan (*primer* dan *sekunder*) yang sesuai dengan fokus studi ini. Yang dalam konteks ini, adalah untuk mengkonstruksikan

fenomena kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan orang Gu-Lakudo, sejak di daerah asal mereka, kemudian melakukan *urbanisasi* dan *migrasi* desa-kota. Selanjutnya, mereka mengembangkan usaha perdagangan yang dimulai di kota Bau-Bau, hingga ke kota Raha dan Kendari di Sulawesi Tenggara.

Dengan demikian, dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi orang Gu-Lakudo sebagai salah satu etnik lokal yang ada di Sulawesi Tenggara, ketika mereka berupaya melakukan transformasi sosial ekonomi. Artinya, mereka melakukan perubahan bentuk dan orientasi kehidupan sosial ekonomi dari sistem ekonomi subsisten di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna pada konteks ekonomi modern di perkotaan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini telah berlangsung sejak bulan Juli 2007 hingga Maret 2008, dengan lokasi pada empat wilayah di Sulawesi Tenggara, yaitu: Gu-Lakudo, Bau-Bau, Raha, dan Kendari, kemudian dilanjutkan di Tanah Abang, Jakarta. Begitu luasnya jangkauan lokasi penelitian lapangan adalah merupakan tuntutan yang mesti dilakukan dari pencarian data yang lebih utuh dengan varian analisis yang cenderung rumit dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan sebagai konsekwensi logis dari suatu proses kerja penelitian, ketika kita ingin mengetahui dan memahami secara lebih *komprehensif* tentang bagaimana fenomena kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan suatu komunitas atau masyarakat yang merujuk dari konteks perkembangan latar belakang *sosio-historis* dan *kultural* serta sistem nilai keagamaan mereka, seperti halnya *komunitas urban* orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara.

Sejak desain awal penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif, adalah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap proses perubahan yang bersifat sistemik *sosio-ekonomik* tentang orientasi kehidupan orang Gu-Lakudo. Karena sebelumnya, mereka hanya terkonsentrasi pada kehidupan ekonomi *subsisten* dan berbasis di pedesaan pada mobilitas perdagangan di perkotaan yang disertai dengan penguatan jaringan sistem usaha perdagangan mereka dalam konteks lokal di Sulawesi Tenggara.

Dengan demikian, maka tujuan akhir dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui secara konstruktif bagaimana proses transformasi sosial *kaum urban* dan *migran* orang Gu-

Lakudo sejak dari daerah asalnya, yang sebelumnya mereka hanya terkonsentrasi pada kehidupan ekonomi yang *subsisten*. Namun, setelah melakukan *migrasi* desa-kota, mereka mulai tampil sebagai pelaku ekonomi perdagangan yang cukup kompetitif. Sehingga, dapat dikategorikan “sukses” dalam melakukan transformasi dan mobilitas sosial ekonomi dari konteks pedesaan ke perkotaan. Adapun kelangsungan prosesnya dapat ditelusuri dari bagaimana fenomena kehidupan mereka sejak di daerah asalnya:

- (1). Berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi, budaya, dan agama orang Gu-Lakudo di daerah asalnya di bagian selatan pulau Muna, ketika mereka sebelum melakukan urbanisasi dan migrasi.
- (2). Peranan KH. Abdul Syukur ketika melakukan pembaruan paham keagamaan dalam Islam terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Gu-Lakudo. Yang dalam prosesnya berimplikasi pada: (a) perubahan orientasi paham keagamaan; (b) tumbuhnya etos kerja mereka yang dibentuk oleh nilai-nilai ajaran Islam; dan (c) mereka termotivasi untuk melakukan urbanisasi dan mengembangkan perdagangan di perkotaan.
- (3). Menelusuri bagaimana orang Gu-Lakudo: (a) memulai aktivitas ekonomi perdagangan di kota Bau-Bau; (b) melakukan diversifikasi usaha dagang; (c) melakukan perluasan pasar ke kota lain; dan (d) mengembangkan jaringan perdagangan lokal di Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dikategorikan memiliki manfaat, kalau hasil yang dicapai oleh studi tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pengembangan keilmuan di dunia akademik. Selain itu, menjadi rujukan instrumen atau model alternatif dalam “perencanaan pembangunan” yang berorientasi pada penguatan basis-basis ekonomi masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Yang tentu saja dalam hal ini, adalah untuk konteks Sulawesi Tenggara.

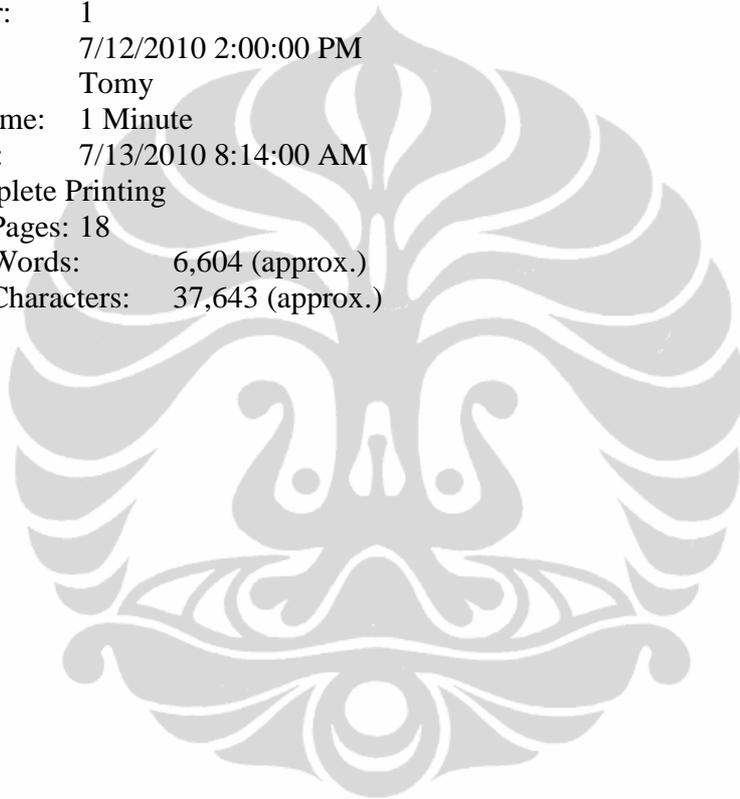
- (1) Dapat memberikan kontribusi keilmuan—baik pada konteks empirik maupun tataran pemikiran teoretik—dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan studi sosiologi ekonomi pada dunia akademik di Indonesia.
- (2) Dapat memberikan kontribusi yang mendasar terhadap pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan dan penguatan model ekonomi masyarakat desa-kota.

- (3) Dapat menawarkan suatu “model pemberdayaan ekonomi” bagi komunitas-komunitas masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang perlu mensinergiskan semua potensi atau modal (*capital*) yang dimiliki, seperti: alam, manusia, budaya, spiritualitas agama, sosial, politik, dan ekonomi (*finansial*).

Oleh karenanya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di dunia akademik. Selain itu, bisa menjadi rujukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah berkaitan dengan “pemberdayaan ekonomi” masyarakat. Dengan keunggulan kompetitif etos ekonomi perdagangan yang ada pada orang Gu-Lakudo, agaknya dapat diadopsi oleh elemen-elemen masyarakat lain, khususnya di Sulawesi Tenggara.



Filename: BAB I
Directory: F:
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/12/2010 1:59:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 7/12/2010 2:00:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 7/13/2010 8:14:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 18
Number of Words: 6,604 (approx.)
Number of Characters: 37,643 (approx.)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dilaksanakannya gagasan-gagasan neoliberalisme, seperti: privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan, deregulasi, penghapusan subsidi, dan investasi asing langsung, seolah menandakan dominasi neoliberalisme di negara-negara berkembang. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang melahirkan dunia tanpa batas (globalisasi) semakin memperkuat pernyataan bahwa sekarang adalah eranya neoliberalisme¹.

Praktek neoliberalisme di negara-negara berkembang tidak terlepas dari peran lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank) guna mengatasi permasalahan keuangan dan neraca pembayaran yang sedang dialami negara-negara tersebut. Dengan diterimanya resep yang dianjurkan, maka secara otomatis masuklah hutang luar negeri dan modal asing ke negara-negara berkembang yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun mengalirnya utang luar negeri dan modal asing tersebut telah melahirkan permasalahan baru bagi negara-negara berkembang, yakni kewajiban untuk melakukan pembayaran (*debt trap*).

¹Menurut Harvey (2009), Apabila neoliberalisme diartikan sebagai “suatu proyek utopian untuk merealisasikan gagasan teoritis tentang reorganisasi kapitalisme internasional atau sebagai proyek politik untuk membangun kembali kondisi-kondisi yang kondusif bagi akumulasi capital dan untuk memulihkan kembali kekuasaan elit ekonomi dengan cara terciptanya perdagangan bebas” (hal. 31). Dan globalisasi menurut James Petras (2001) “Sebagai suatu gambaran (deskripsi) mengenai perluasan dan pendalaman aliran perdagangan, modal, teknologi dan informasi internasional dalam suatu pasar global (dunia) yang terpadu satu-satunya” (hal.1). Maka dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah cara untuk mendistribusikan gagasan-gagasan neoliberalisme guna terwujudnya (percepatan) perdagangan bebas internasional dengan cara meminggirkan peran Negara. Atau dengan kata lain menurut James Petras (2001) bahwa globalisasi hanyalah kedok dari semangat utamanya kapitalisme neoliberal.

Table 1.1 Hutang dan pembayaran hutang, Amerika Latin, 1982-1998 (dalam milyar dollar, rata-rata tahunan, harga sekarang)

	80	87	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Stok Hutang	257	474	476	491	450	526	647	607	627	650	698
Presentase GNP	36	66	45	45	42	37	35	30	35	33	36
Pembayaran Hutang	30	47	41	39	37	38	35	36	35	33	35
Presentase Ekspor	36	37	32	26	28	29	29	-	-	-	-

Sumber: Petras dan Veltmeyer (2001), h. 81

Dari table 1.1 diatas dapat terlihat bagaimana komposisi hutang negara-negara di Amerika Latin melonjak drastis dari tahun 1980 yang hanya sebesar 257 milyar, menjadi 698 milyar pada tahun 1998. Artinya utang luar negeri yang awalnya diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, malah justru melahirkan malapetaka bagi negara-negara berkembang. Sehingga kondisi ini menyebabkan kehancuran perekonomian dan krisis yang semakin mendalam. Oleh Stiglitz (2006) dinyatakan bahwa utang yang diberikan membuat negara-negara berkembang menjadi semakin miskin dan tak mungkin untuk melunasinya.

Begitu juga halnya dengan investasi asing (PMA) yang dilakukan oleh MNC/TNC telah melahirkan ketimpangan pendapatan antara negara-negara maju (asal modal) dengan negara-negara berkembang, ini bisa dilihat dari data yang disampaikan Petras dan Veltmeyer (2001) bahwa penghasilan dari 100 MNC/TNC, 50%nya dihasilkan dari keuntungan luar negeri (ekspansi ke negara-negara berkembang). Ini tentu akhirnya berpengaruh negatif terhadap saldo pembayaran di negara-negara Amerika Latin.

Table 1.2 Pembayaran pendapatan dalam investasi equity dan tingkat laba (milyaran dolar AS, rata-rata tahunan)

	1993	1994	1995	1996	1997
Pendapatan dari Asset	27,5	34,7	41,6	40	59
Investasi Asing	14,5	16,6	16,2	17,8	28,9
Lain-lain	12,9	18,1	25,4	22,2	30,1

Sumber:
Sumber:
dan

Petras
Veltmeyer (2001), h. 88

Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara Asia, khususnya Thailand yang pada tahun 1996 hutang luar negerinya mencapai 50% dari PDB (produk domestik bruto), kredit macet sebesar 6,5% dari total pinjaman yang diberikan, dan banyaknya pinjaman jangka pendek pihak swasta dari luar negeri yang nilainya sebesar 74,2% dari keseluruhan *net capital inflow*, telah menyebabkan rentannya fundamental ekonomi Thailand dalam perspektif stabilisasi ekonomi jangka panjang. Artinya bahwa pihak swasta asing ikut berperan terjadinya krisis di Thailand. Oleh Sritua Arif (1998) dikatakan bahwa “hutang luar negeri swasta Thailand melalui institusi-institusi keuangan adalah hasil kerjasama dengan pihak asing” (h.369).

Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Berbagai permasalahan perekonomian nasional dipertengahan tahun 60-an yakni: defisit anggaran belanja mencapai 50% dari pengeluaran total negara, penerimaan ekspor turun drastis, dan terjadi hiperinflasi sebesar 650% telah menyebabkan hampir lumpuhnya perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah orde baru memutuskan untuk membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU No 1 tahun 1967) yang diharapkan dapat menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia (Hadi, Jaslim, Edi, Arianti, Pradana, & Damayanti, 2004).

Harapan pemulihan secepatnya perekonomian nasional tersebut selain membuat UU tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mempersilahkan investasi asing masuk ke Indonesia (*open door policy*), juga menghadiri pertemuan-pertemuan lembaga keuangan internasional (lobby dan membangun hubungan baik dengan lembaga donor)

guna mencari bantuan untuk mengatasi inflasi dan membiayai pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia.

Perjuangan tersebut akhirnya melahirkan hasil dengan terbentuknya konsorsium pemberi dana bagi Indonesia dengan bunga rendah yang bernama IGGI (*Intergovernmental Group on Indonesia*). Terbentuknya IGGI pada tahun 1967 telah berperan besar terhadap komposisi anggaran Indonesia, menurut Kwik (2006) “anggaran pembangunan Indonesia pada tahun 1988/1989 didominasi oleh bantuan dari IGGI/CGI sebesar 80, 86%, dan ini telah berlangsung sejak tahun 1965, dimana andil utang luar negeri terhadap anggaran pembangunan Indonesia rata-rata berkisar 35%” (h.27). Bahkan sidang ke XIV CGI² di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2005, CGI memberikan bantuan yang lebih tinggi dari yang diusulkan pemerintah yakni sebesar 3,4 milyar dollar AS³.

Table 1.3 Posisi Utang luar Negeri Indonesia (dalam juta dolar AS)

Hutang	1997	1998	1999	2000	2001
IGGI	34.663	38.789	44.058	44.099	42.020
Non IGGI	19.202	28.526	31.663	30.792	27.384
Lembaga Keuangan	17.778	12.836	11.871	8.868	7.713
Bukan Lembaga Keuangan	54.173	65.447	57.208	55.738	52.345
Surat Berharga	10.271	5.288	3.298	2.197	3.612

Sumber: Litbang Kompas (2002)

Ditambah lagi dengan adanya restrukturisasi perbankan pada tahun 1988 yang memperbolehkan bank-bank asing dan lokal membuka cabangnya diluar Jakarta (meningkatnya jumlah bank dari 61 bank menjadi 230 bank pada tahun 1988)⁴, seolah semakin mengukuhkan paradigma pembangunan Indonesia yang lebih liberal, dengan

² Pada tahun 1992 IGGI berganti nama menjadi CGI (*Consultative Groups on Indonesia*)

³ <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/1/25/e3.htm>

⁴Ibid 6

cara memberikan kesempatan dan kemudahan kepada swasta untuk melakukan investasi. Begitu juga pada tahun 1994, menurut Hadi, Jaslim, Edi, Arianti, Pradana & Damayanti (2004) pemerintah kembali melakukan serangkaian program liberalisasi di sektor keuangan, dengan cara memperbolehkan 100% kepemilikan asing. Kondisi inilah yang melahirkan berbagai permasalahan seperti defisit neraca pembayaran, ketimpangan pendapatan yang cukup serius, meningkatnya jumlah pengangguran, tingginya jumlah penduduk yang miskin, dan utang luar negeri yang semakin meroket.

Dari konteks regional perekonomian Asia Tenggara mulai mengalami gangguan, dan memuncak ketika mata uang Bath Thailand jatuh pada tanggal 2 Juli 1997 sebesar 22%. Menurut data litbang Kompas (2002), anjloknya Bath dari 24,700 menjadi 29,100 per dolar AS telah membuat pemerintah Thailand menutup 56 dari 58 lembaga keuangan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya krisis di berbagai belahan negara, termasuk Indonesia. Sehingga memaksa pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman sebesar 40 milyar dolar AS kepada IMF dengan diikuti berbagai prasyarat yang tercantum didalam *Letter of intent* (LOI) antara pemerintah dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998.

Tabel 1.4 Garis besar *Letter of Intent* (LOI)

Kebijakan Umum	Jabaran Kebijakan
Kebijakan Makro Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Fiskal 2. Kebijakan Moneter dan nilai tukar
Restrukturisasi sektor keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi Bank 2. Memperkuat aspek hukum dan

	pengawasan untuk bank
Reformasi struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi structural perdagangan luar negeri dan investasi 2. Deregulasi dan swastanisasi 3. Social safety net dan lingkungan hidup

Sumber: Lepi T. Tarmidi, (1998), (diolah)

Kesepakatan ini akhirnya bermuara kepada ditutupnya 16 bank nasional (krisis sektor perbankan), digulirkan bantuan likuiditas bank Indonesia sebesar (Rp.144,5 Trilyun), dikuasainya hampir setiap jengkal tanah oleh korporasi (HPH 35, 1 juta hektar, HGU 15,0 juta hektar, dan HTI, 35,1 hektar⁵), privatisasi besar-besaran terhadap sejumlah BUMN, meroketnya utang luar negeri (Rp. 1.462 trilyun tahun 2008) dan bangkrutnya beberapa perusahaan yang menyebabkan terjadi PHK besar-besaran. Kondisi ini akhirnya menyebabkan Indonesia terjebak kepada krisis yang semakin dalam.

1.2 Rumusan Penelitian

Penanaman modal di negara-negara berkembang selalu diidentikkan dengan program neoliberalisme, dan tidak sedikit penanaman modal tersebut telah melahirkan berbagai permasalahan di tempat negara tujuan investasi. Ini juga terjadi di Indonesia, bagaimana kebijakan yang menggunakan paradigma liberal “kebijakan pintu terbuka” (UU No 1 tahun 1967) di awal pemerintahan orde baru telah melahirkan berbagai permasalahan seperti, kerusakan lingkungan (hancurnya 80% daerah aliran sungai), kesenjangan sosial (bahkan telah melahirkan tindak kekerasan antara penanam modal dengan masyarakat disekitarnya: 1.753 kasus kurun waktu 1970 – 2001).

Dari berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan tersebut, kemudian lahirlah kesadaran bahkan perlawanan dari berbagai komponen masyarakat Indonesia

⁵ Data Walhi tahun 2005

(akademisi, NGO maupun partai politik), untuk melakukan kontrol terhadap penanaman modal di Indonesia⁶. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai salah satu partai (kelompok masyarakat) yang mempunyai keterwakilan di DPR dan mendasarkan kepada pemikiran Soekarno (sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi) sejak awal melihat bahwa neoliberalisme baik secara historis, ideologis, empiris maupun konstitusional tidaklah cocok apabila diterapkan di Indonesia. Sehingga pada kongres ke-II tahun 2005 PDI Perjuangan secara tegas menyatakan menolak terhadap berbagai program neoliberalisme, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik⁷.

Berangkat dari pemikiran diatas maka didalam penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana pergulatan⁸ PDIP sebagai partai politik yang mendasarkan kepada gagasan-gagasan Soekarno (nasionalisme kerakyatan) menyikapi dan membahas rancangan undang-undang (RUU) penanaman modal yang diajukan pemerintah ke DPR-RI untuk dibahas bersama.

1.3 Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana pergulatan PDI Perjuangan dalam menghadapi neoliberalisme, khususnya dalam penyusunan UU penanaman modal.
2. Bagaimana sikap PDI perjuangan terhadap UU No. 25 tentang penanaman modal

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pergulatan PDI Perjuangan dalam menghadapi Neoliberalisme, khususnya dalam penyusunan UU penanaman modal.

⁶Penanaman modal diharapkan dapat benar-benar bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia (kesejahteraan rakyat)

⁷Studi dokumen peneliti “hasil-hasil keputusan kongres II PDIP tahun 2005 di Bali”

⁸Pengertian pergulatan menurut kamus besar bahasa Indonesia (edisi ketiga, 2007 depdiknas, balai pustaka) adalah usaha yang keras; sama artinya dengan perjuangan

2. Bermaksud untuk menggambarkan sikap PDIP terhadap UU No.25 Tahun tentang penanaman modal

1.5 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana studi teoritis di bidang nasionalisme dan neoliberalisme pada umumnya, dan studi ideologi partai politik pada khususnya.
2. Studi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan praktis: parpol, NGO dan akademisi, sebagai sebuah strategi untuk menghadapi neoliberalisme.

1.6 Batasan Penelitian

Didalam penelitian ini hanya dilihat bagaimana pergulatan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mendasarkan kepada gagasan-gagasan Soekarno dalam mengahalui proses (neo) liberalisasi di Indonesia, khususnya pergulatan dalam penyusunan undang-undang penanaman modal pada tahun 2006 – 2007 (sebagai pintu masuk arus modal dari berbagai korporasi, baik korporasi nasional maupun internasional).

1.6.1 Nasionalisme PDI Perjuangan

1. Nasionalisme PDI Perjuangan sesuai dengan hasil kongres II tahun 2005 di Bali adalah nasionalisme berwatak kerakyatan dan kemanusiaan, yakni nasionalisme yang berakar dari pemikiran Soekarno (sosio nasionalisme adalah nasionalismenya yang *social bewust*), nasionalisme yang ingin mencari selamatnya kaum marhaen, wong cilik.
2. Nasionalisme PDI Perjuangan adalah nasionalisme untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan Pancasila 01 Juni 1945, dimana dikatakan bahwa tujuan Indonesia merdeka adalah “semua untuk semua”, bukan satu untuk semua, semua untuk satu⁹. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa nasionalisme PDI perjuangan adalah nasionalisme yang tidak mendasarkan kepada paham individualisme.

⁹Pidato Soekarno dihadapan BPUPKI pada tanggal 01 juni 1945 mengenai dasar negara Indonesia Pancasila

3. Nasionalisme PDI Perjuangan adalah nasionalisme yang mengidealkan fungsi negara mampu melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan warga bangsanya¹⁰. Namun dengan demikian bukan berarti PDI Perjuangan menempatkan negara secara dominan (fasistik) terhadap warga negaranya, tetapi lebih mencari hubungan yang dinamis antara negara dan rakyat: Hubungan yang dinamis antara negara yang berdaulat (*souverign state*) dan rakyat yang berdaulat (*popular sovereignty*)¹¹.

1.6.2 Praktek Neoliberalisme

Program-program neoliberalisme yang disosialisasikan oleh lembaga lembaga keuangan internasional kepada negara-negara berkembang (kebanyakan yang sedang mengalami krisis/butuh bantuan), dan didukung oleh MNC/TNC, seperti privatisasi BUMN, liberalisasi keuangan, pengurangan subsidi sector sosial dan penanaman modal asing pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan perdagangan bebas internasional dengan cara meminggirkan peran negara.

Untuk mewujudkan perdagangan bebas internasional tersebut, salah satunya adalah menghapus hambatan-hambatan bagi MNC/TNC untuk dapat beroperasi di negara-negara berkembang (deregulasi), dan memberikan ruang kepada investor asing untuk masuk ke negara-negara tujuan investasi melalui jalur formal (pembuatan UU). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa modal yang ditanam aman dan menguntungkan. Kondisi ini pernah dialami Indonesia, bagaimana UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing menjadi pintu masuk bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga modal asing dengan leluasa bisa masuk melalui jalur konstitusional, dan beroperasi secara luas tanpa ada hambatan.

1.6.3 UU Penanaman Modal

¹⁰Ini sesuai dengan tujuan bernegara Indonesia (tercantum dalam pembukaan UUD 1945), bahwa negara berfungsi melindungi segenap tumpah darh indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan dan menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan

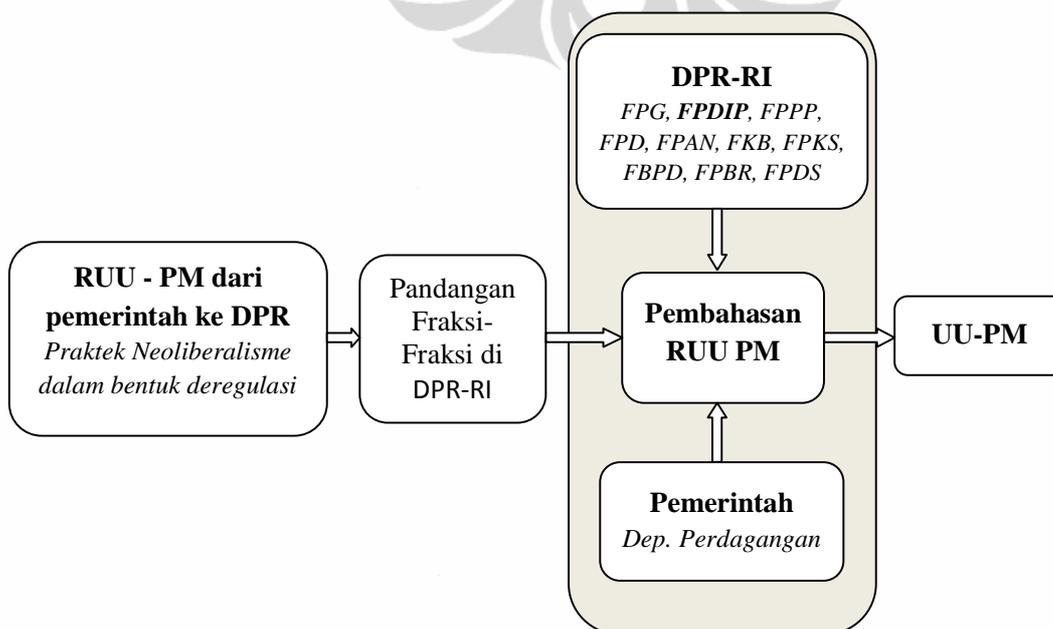
¹¹ Manifesto Nasionalisme Kerakyatan PDI Perjuangan

Undang-undang penanaman modal yang mempunyai semangat untuk merevisi UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan undang-undang yang paling banyak menuai kontroversi, baik pro maupun kontra. Ini tidak terlepas karena UU tersebut seringkali diidentikkan sebagai undang-undang yang bernapaskan neoliberalisme, sehingga mendapatkan pertentangan dan perlawanan dari beberapa fraksi, khususnya fraksi PDI Perjuangan yang ideologinya mendasarkan kepada gagasan-gagasan Soekarno.

Dalam penelitian ini digambarkan mengenai proses penyusunan UU penanaman modal, mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disampaikan pemerintah ke DPR, antara DPR dengan pemerintah (setelah mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR), sesama anggota DPR (internal) maupun dengan pemerintah, sampai dengan disetujuinya RUU Penanaman modal pada rapat paripurna tanggal 29 Maret 2007, dan sikap akhir PDI Perjuangan terhadap UU Penanaman Modal (UU No 25 tahun 2007

1.7 Model Operasional Penelitian

Model operasional dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1.1 Model operasional penelitian

Dari model di atas menggambarkan bahwa program neoliberalisme dijalankan dalam bentuk penanaman modal langsung. Proses liberalisasi tersebut dimulai dengan melakukan deregulasi (menghapus hambatan-hambatan investasi), dengan cara membuat aturan-aturan baru dalam bentuk undang-undang guna memuluskan keluar masuknya arus modal dari investor asing ke negara-negara berkembang (Indonesia)¹².

Dalam proses pembuatan aturan-aturan formal tersebut (UU), di Indonesia haruslah mendapatkan persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif, untuk kemudian disahkan dan berlaku secara nasional¹³. Ini bisa terlihat bagaimana RUU yang diajukan pemerintah ke DPR harus mendapatkan persetujuan untuk diagendakan bersama guna masuk ketahap selanjutnya (pembahasan). Dalam proses ini hampir seluruh fraksi di DPR-RI menyetujui bahwa RUU ini perlu ditindaklanjuti untuk masuk ke pembahasan (diserahkan ke komisi VI). Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa penanaman modal sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

Setelah mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR-RI, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan (penyusunan) oleh komisi VI dengan departemen perdagangan (pihak pemerintah). Disinilah terjadi satu proses pergulatan baik di internal DPR (antara fraksi-fraksi) maupun antara DPR dengan pemerintah¹⁴. Fraksi PDI Perjuangan sebagai salah satu fraksi di komisi VI DPR-RI yang mempunyai 9 orang anggota

¹²Menurut Baswir (2006), biasanya yang pertama mereka lakukan (guna meliberalisasi sebuah negara) adalah mempersiapkan segala perangkat, berupa undang-undang, rencana pembangunan dan proposal peminjaman yang memungkinkan bekerjanya tangan-tangan kapitalisme global di pemerintahan.

¹³UU No 10 tahun 2003 tentang tata cara pembuatan UU; bahwa usulan untuk membuat UU bisa berasal dari eksekutif maupun legislatif

¹⁴Di internal DPR sendiri terjadi pergulatan antara anggota-anggota fraksi di komisi VI. Setelah terjadi pergulatan, diputuskan bahwa suara di DPR menjadi satu (terlebih dahulu adanya sinkronisasi), kemudian pembahasan dilanjutkan antara DPR dengan pemerintah.

melakukan pergulatan dengan cara memberikan usulan, koreksi, perbaikan atau bahkan penolakan terhadap point-point tertentu.



Filename: BAB I erlan
Directory: F:
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/12/2010 6:57:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 7/12/2010 6:58:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 7/13/2010 8:15:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 12
Number of Words: 2,869 (approx.)
Number of Characters: 16,355 (approx.)

